



Fisherwomen's Inclusive Network for Growth and Sustainability (WINGS): Inovasi Pemberdayaan Eksistensi Perempuan Nelayan melalui Intervensi Berbasis Gender dan Ketahanan Pangan

Nadya Saskie Kirani, M. Rais Makka, dan Daffa Ulhaq

Universitas Indonesia

nadya.saskirani@gmail.com, raism5345@gmail.com, daffaaulhaq28@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menyoroti pentingnya penguatan dan perlindungan terhadap eksistensi hak asasi manusia khususnya bagi perempuan nelayan melalui intervensi berbasis gender untuk mendukung ketahanan pangan, melindungi eksistensi perempuan nelayan melalui kebijakan pemerintah, dan mendorong keberlanjutan. Intervensi ini dilakukan baik melalui kelompok kecil maupun komunitas dengan menitikberatkan pada evaluasi program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan bertujuan untuk membangun jejaring serta memaksimalkan keberlanjutan dari program-program yang ada. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyajikan prioritas kebijakan dengan mengatasi eksklusivitas kebijakan pemerintah, mengurangi ketimpangan gender, dan mengatasi budaya patriarki yang masih kental. Subjek utama penelitian adalah perempuan nelayan yang menjadi salah satu kelompok marginal, terutama pasca COVID-19. Metode penelitian yang digunakan adalah *literature review* dengan menelusuri lima pangkalan data, yakni Sciedencedirect, Taylor & Francis, Google Scholar, Scopus, dan Sage Journals. Hasil dari pencarian artikel dibuat dalam bentuk tabel kontingensi untuk membandingkan, memahami, dan memodifikasi berbagai kebijakan yang ada di berbagai negara sehingga dapat digunakan kepada subjek penelitian ini. Hasil yang diharapkan adalah prioritas rekomendasi kebijakan yang telah ditetapkan berbagai negara dan disesuaikan dengan karakteristik yang ada di Indonesia sehingga dapat diaplikasikan kepada perempuan nelayan di berbagai penjuru Indonesia.

Kata Kunci: *Intervensi Gender, Hak Asasi Manusia, Kebijakan, Ketahanan Pangan, Perempuan Nelayan*



Pendahuluan

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki potensi besar untuk menjadi Poros Maritim Dunia (Kominfo, 2016). Namun, masyarakat pesisir, yang mayoritas adalah nelayan, hidup dalam kemiskinan akibat sulitnya akses pada sumber daya, rendahnya pendidikan, dan terabaikannya wilayah pesisir dalam pembangunan (Silviyana, 2023). Padahal, nelayan memiliki peran kontribusi penting, mencapai 70% dari produksi perikanan dunia (*Jurnal Perempuan*, 2017).

Satu aspek yang sering terabaikan terkait kehidupan nelayan adalah kontribusi dan peran perempuan dalam rumah tangga nelayan. Berdasarkan penelitian Novia Ambar dan Titin Liana (2021), perempuan nelayan mengalokasikan waktunya untuk kegiatan domestik, produktif, dan kegiatan sosial pribadi selama 17 jam dalam sehari. Perempuan nelayan memainkan peran penting di sektor perikanan, meliputi melaut (mencari ikan), menjual ikan (pemasaran), pemilik kapal, investor, hingga menjadi konsumen produk perikanan (USAID, 2016 dalam Wahyuni, Nikodemus, & Marisa, 2022). Perempuan nelayan juga berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan rumah tangga. Mereka terlibat dalam kegiatan ketersediaan pangan (*food availability*), akses pangan (*food accessibility*), dan pemanfaatan pangan (*food utilization*) yang memastikan kebutuhan gizi keluarga terpenuhi dan pangan yang dikonsumsi berkualitas baik (Arumsari dan Rini, 2008; Ibnouf, 2009; Karl, 2013 dalam Hayati dan Arifudin Sahidu, 2023). Penelitian yang dilakukan Kusnandi (2006 dalam Alfiah, Mustakim, dkk., 2020) menguatkan penemuan tersebut dengan menunjukkan potensi penting istri nelayan dalam pembangunan pesisir, dengan beberapa pertimbangan pemikiran, yaitu istri nelayan mengambil peran besar dalam kegiatan sosial ekonomi di darat, keterlibatan perempuan pesisir dalam mencari nafkah keluarga, dan perempuan pesisir memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kelangsungan hidup rumah tangga.

Meskipun peran perempuan dalam rantai nilai ekonomi perikanan sangat besar, mulai dari pra produksi hingga pemasaran, mereka masih kurang mendapatkan perhatian dan pengakuan, baik dari pemerintah maupun dari lingkungan sosial masyarakat. Hal tersebut dapat terlihat dari terminologi “nelayan” masih cenderung diasosiasikan dengan laki-laki, sehingga perempuan nelayan sering tidak diakui dalam undang-undang atau kebijakan, meskipun mereka berkontribusi besar dalam sektor perikanan (Herper dkk., 2013 dalam Wahyuni, 2023; Wahyuni, 2023; Rostiyanti, 2018; Ambari, 2019). Peran perempuan dalam ekonomi rumah tangga nelayan juga sering dianggap rendah, dengan alokasi waktu perempuan terhadap kegiatan *income generating* hanya 1,85 jam per hari dibandingkan dengan laki-laki 6,5 jam per hari (Suminar, 1996; Yusniah & Anggraini, 2018). Peran perempuan pesisir dalam urusan domestik, publik, dan kegiatan sosial-ekonomi tidak hanya menghadirkan peran ganda (*double burden*), tapi tiga peran (*triple burden*), yaitu peran reproduksi, produktif, dan peran sosial (Novita, Deditiani, dan Irfan, 2022).

Hambatan lain yang dihadapi perempuan nelayan untuk meningkatkan keterlibatan publik dan mengakses ketersediaan sumber daya adalah kemiskinan. Tingkat kemiskinan di wilayah pesisir lebih tinggi daripada di pedesaan atau perkotaan. 25% dari total populasi perempuan pesisir hidup dalam kemiskinan dan 60% dari mereka bekerja di sektor informal dengan penghasilan di bawah upah minimum (BPS, 2023; Hafizah, Saipul, dkk., 2023). Kemiskinan ini berdampak buruk pada akses kesehatan, pendidikan, dan kesempatan ekonomi perempuan nelayan, selain ketidaksetaraan gender dalam proses pengambilan keputusan (Olapade dan Sesay, 2019).

Pendekatan feminism digunakan untuk menghadirkan solusi atas permasalahan yang dihadapi perempuan nelayan, dengan menekankan kesetaraan gender dan melawan berbagai bentuk diskriminasi yang mereka hadapi di sektor perikanan (Hannam, 2013). Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana batas-batas sosial yang patriarkal menghambat perempuan nelayan untuk mendapatkan akses ke sumber daya yang dibutuhkan serta diskriminasi dalam kebijakan pemerintah yang sering kali tidak mengakui hak-hak perempuan nelayan (Wisnu dan Hasrin, 2022).

Fisherwomen's Inclusive Network for Growth and Sustainability (WINGS) melakukan upaya untuk memberdayakan perempuan nelayan dengan pendekatan berbasis gender dan ketahanan pangan. Hasil penelitian Kurniawati (2017) menunjukkan bahwa perempuan nelayan berperan penting dalam peningkatan pendapatan rumah



tangga dan keterlibatan mereka di sektor perikanan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dari program WINGS, diharapkan memberikan rekomendasi penguatan keterlibatan perempuan dalam sektor perikanan dan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi mereka.

Analisis Kritis: Eksklusi Perempuan di Sektor Perikanan dan Ketahanan Pangan di Indonesia

1. Pendekatan Partisipatif dan *Co-Management*

Beberapa studi yang dilakukan oleh Melita, Kennedy, dkk dan Tendayi, David, Mils, dkk. menunjukkan bahwa penerapan pendekatan *co-management* yang melibatkan komunitas nelayan lokal berpotensi meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Hal ini menunjukkan *model top-down* sering kali tidak relevan dengan kebutuhan lokal. *Co-management* dan partisipasi aktif masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan mengakui kekuatan pengetahuan tradisional dan pengetahuan lokal.

2. Keadilan Gender dan Inklusivitas

Bahasan mengenai keadilan gender muncul sebagai fokus utama dalam berbagai studi (Mark Axelrod, Meghan Vona, dkk., Dilanthi Koralagam, Joyeeta Gupta, dkk., Madeleine Gustavsson, Katia Frangouides, dkk.). Penelitian ini menyoroti ketidaksetaraan yang dialami perempuan dalam sektor perikanan, baik dalam pengambilan keputusan, akses yang adil terhadap sumber daya, maupun distribusi manfaat ekonomi. Gagasan “Blue Justice” menunjukkan bahwa perempuan nelayan memiliki hak yang sama dalam pengelolaan dan akses terhadap sumber daya. Selain itu, P.S. Swathi Lekshmi, Kalidoss Radhakrishnan, dkk. dalam penelitian yang mereka melakukan menyarankan reformasi kebijakan terkait upah yang lebih egaliter antara laki-laki dan perempuan.

3. Adaptasi terhadap Perubahan Iklim

Penelitian yang dilakukan oleh Ana Carolina, Derek Armitage, dkk. dan Daniel, Silvana, dkk. menge-laborasi pentingnya kerangka adaptasi dalam menghadapi perubahan iklim, terutama dalam komunitas nelayan kecil. Mereka menekankan bahwa strategi adaptasi berbasis lokal yang mengakui kearifan lokal dan keretakan spesifik nelayan dapat memberikan hasil positif. Kerangka “Vulnerability” memberikan panduan sistematis untuk mengevaluasi risiko perubahan iklim.

4. Kolaborasi Lintas Sektor dan Disiplin

Beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh Julia Nakamura, Ratana Chuenpagdee, dkk. menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan disiplin ilmu untuk menyukkseskan penerapan panduan perikanan berkelanjutan. Studi ini juga memberikan panduan dalam memahami bagaimana kerangka hukum dan kebijakan di berbagai negara dapat disesuaikan untuk memperkuat sektor perikanan skala kecil.

Identitas Perempuan Nelayan: Aktor Utama Sektor Perikanan Tanpa Payung Kebijakan

Di Indonesia, definisi “perempuan nelayan” tidak secara eksplisit dibedakan dari “nelayan” dalam kerangka hukum. Menurut UU No. 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, siapapun yang mencari nafkah dengan menangkap ikan dianggap sebagai nelayan tanpa memandang jenis kelamin (BPK, 2016). Namun, dalam praktiknya, perempuan sering tidak diakui sebagai nelayan dan dikecualikan dari manfaat serta perlindungan yang diberikan kepada nelayan yang terdaftar. Norma sosial dan budaya yang memandang perempuan sebagai ibu rumah tangga dan laki-laki sebagai pencari nafkah menyebabkan perempuan dipandang sebagai kontributor sekunder atau tidak dibayar dalam kegiatan penangkapan ikan (Napitupulu, 2020). Akibatnya, perempuan menghadapi hambatan dalam mengakses sumber daya, pelatihan, dan peluang di industri perikanan.

UU No. 7/2016 hanya menyebut kata “Perempuan” satu kali, yaitu pada Pasal 45 yang menyebutkan peran perempuan dalam rumah tangga nelayan, tetapi tidak mengakui perempuan sebagai nelayan secara penuh. Akibatnya, perempuan nelayan mengalami marginalisasi dan pengucilan dari program pemberdayaan yang seharusnya mereka terima. Pemerintah turut melanggengkan diskriminasi berbasis gender dengan tidak



memberikan akses yang sama terhadap program perlindungan dan pemberdayaan bagi perempuan nelayan. Selain itu, UU tersebut tidak mencakup ketentuan yang membahas kebutuhan dan tantangan khusus yang dihadapi oleh perempuan nelayan, sehingga mereka tidak cukup dilindungi atau diberdayakan dalam industri perikanan (Purwanti, Wijaningsih, dkk., 2021).

Pengakuan hukum ini penting untuk memungkinkan perempuan nelayan mengakses program dan layanan pemerintah, seperti jaminan asuransi kecelakaan kerja dan bantuan sosial serta ekonomi. Dengan perubahan status pekerjaan, perempuan nelayan dapat mengakses tunjangan dan program yang dirancang khusus untuk nelayan, seperti bantuan sarana dan prasarana serta bantuan konservasi yang dapat meningkatkan mata pencaharian dan partisipasi mereka di sektor perikanan (*Infrastructure Improvement for Shrimp Aquaculture Project: Report and Recommendation of the President*, 2022).

Kerangka hukum yang lebih inklusif diperlukan untuk mempromosikan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dalam industri perikanan. Beberapa negara telah berhasil menerapkan kerangka hukum yang inklusif. Contohnya, undang-undang perikanan Prancis tahun 1997 yang memberikan pengakuan hukum terhadap peran perempuan dalam industri perikanan. Undang-undang ini memungkinkan perempuan bergabung dengan organisasi nelayan, mengakses pelatihan, dan mendapatkan tunjangan jaminan sosial, serta mengakui status pasangan kolaboratif (CSS), yang memungkinkan perempuan mewakili perusahaan keluarga dan komunitas mereka (*European Institute of Gender Equality*, 2017). Selain itu, Deklarasi Santiago de Compostela untuk Kesetaraan Kesempatan di Sektor Perikanan dan Akuakultur menekankan pentingnya kesetaraan gender di sektor perikanan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (FAO, 2020).

Untuk perubahan yang berkelanjutan, kebijakan menjadi jalur penting yang perlu ditempuh. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia seharusnya mengakui perempuan nelayan sebagai nelayan secara hukum dan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik. Ini termasuk mengubah definisi nelayan dalam UU No. 7/2016 untuk mengakomodasi kerja perempuan di sektor perikanan. Dengan menggunakan pendekatan suprastruktur, pemerintah dapat mengurangi kesenjangan gender dalam akses dan kontrol sumber daya.

Eksistensi Perempuan Nelayan: Peran Tanpa Pengakuan, Pekerjaan Tanpa Jaminan

Perempuan nelayan di Indonesia memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan nelayan, mulai dari menangkap ikan, mengolah, hingga menjual hasil tangkapan. Mereka bukan hanya pendamping suami, tetapi juga agen ekonomi yang berkontribusi pada kesejahteraan keluarga dan masyarakat pesisir. Namun, definisi nelayan yang sempit—yang hanya mengakui mereka yang menangkap ikan—sering kali mengabaikan peran penting perempuan, sehingga mereka tidak mendapatkan pengakuan yang setara dalam kebijakan dan program pemerintah.

Perempuan nelayan berkontribusi besar dalam perekonomian keluarga dan komunitas pesisir, dengan terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan, pengolahan, hingga pemasaran. Dalam upaya pemberdayaan, perempuan nelayan, di beberapa daerah telah dibentuk organisasi, seperti Puspita Bahari di Demak, untuk meningkatkan pengetahuan tentang gender dan memberdayakan mereka secara ekonomi. Istri nelayan, misalnya, memainkan peran penting dalam menyiasati kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. Ketidakpastian pendapatan di laut sering kali memaksa perempuan untuk mencari pendapatan tambahan, misalnya untuk kebutuhan anak sekolah dan relasi sosial kampung (Torere, 2019). Aktivitas ekonomi perempuan nelayan sering kali memanfaatkan sumber daya alam sekitar atau keterampilan yang dimiliki (Sumrin dan Abdul, dkk., 2015). Alokasi waktu perempuan pesisir juga tidak terbatas, dari pagi hingga malam hari, untuk mendapatkan pendapatan lebih banyak (Nurlaili dan Muhartono, 2017). Meski demikian, banyak perempuan yang masih mengutamakan urusan rumah tangga di samping mencari nafkah.

Di Indonesia, perempuan pesisir aktif dalam berbagai tahap produksi perikanan: praproduksi, produksi, dan pascaproduksi. Mereka terlibat dalam menyiapkan bekal melaut, menangkap ikan, mengolah hasil tangkapan, hingga menjualnya. Berdasarkan studi Pusat Data dan Informasi KIARA, perempuan nelayan berperan besar dalam pra-produksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran. Mereka melakukan tugas seperti menyiapkan perbekalan,



melaut, mengolah hasil tangkapan, serta memilah, membersihkan, dan menjual ikan (Indrawasih, Harper, dkk., 2013 dalam Ratna Indrawasih dan Annisa Meutia, 2022).

Dikutip dari artikel “Perempuan Nelayan” yang ditulis Andi Misbahul dan Abby Gina dan diterbitkan *Jurnal Perempuan*, terdapat salah satu dari banyak data yang mampu menunjukkan bahwa beban kerja nelayan perempuan dibanding dengan nelayan laki-laki. Berikut tabel data yang diolah dari hasil observasi langsung Andi Misbahul dan Abby Gina dengan salah satu perempuan nelayan di Desa Morodemak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah (Misbahul dan Gina, 2017).

Tabel 1. Profil Aktivitas Ibu Zarokah dan Pak Subeki

Aktivitas Produksi (Pasar)	Bu Zarokah	Pak Subeki
Menyiapkan Kapal	✓	✓
Menyalakan Mesin		✓
Mengemudikan Kapal		✓
Membuang Air dari Dek Kapal	✓	
Menyiapkan Jaring	✓	
Menebar Jaring	✓	
Menarik Jaring	✓	✓
Memisahkan Ikan dari Jaring	✓	✓
Mengangkut Ikan ke Bakulan	✓	✓
Menjual Ikan	✓	
Membersihkan Kapal	✓	✓
Aktivitas Produksi (nonpasar)		
Memasak	✓	
Menyiapkan Makanan dari Rumah	✓	
Menyiapkan Peralatan Melaut	✓	✓
Mengangkut Perbekalan	✓	✓
Menyiapkan Makanan di Kapal	✓	
Menyiapkan Makanan dari Rumah	✓	
Aktivitas Reproduksi		
Melahirkan	✓	
Merawat Anak	✓	
Aktivitas Sosial Kemasyarakatan		
Puspita Bahari	✓	

Sumber: Diolah dari hasil observasi penulis dan wawancara dengan Zarokah.

Gambar 1. Data hasil observasi Perempuan Nelayan oleh Andi & Abby dalam *Jurnal Perempuan*

Berdasarkan observasi Andi Misbahul dan Abby Gina (2017), perempuan nelayan menghadapi beban kerja ganda yang tidak hanya mempengaruhi ekonomi mereka, tetapi juga menghambat mereka untuk hidup dan bertumbuh. Praktik patriarki yang dihadapi perempuan nelayan bukan hanya terjadi dalam rumah tangga, tetapi juga tercermin dalam kebijakan dan praktik bernegara. Secara keseluruhan, meskipun perempuan nelayan memiliki peran penting dalam sektor perikanan, mereka masih dihadapkan pada tantangan besar karena kurangnya pengakuan dan dukungan yang memadai. Pengakuan yang lebih inklusif dan perlindungan hukum yang lebih baik diperlukan untuk mengurangi kesenjangan gender dalam akses dan kontrol sumber daya, sehingga perempuan nelayan dapat berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan ekonomi dan sosial.

Analisis Teori Feminisme Liberal dan Ekofeminisme dalam Konteks Perempuan Nelayan

Feminisme adalah gerakan yang menginginkan kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang kemanusiaan (Hannam, 2013). Gerakan ini berusaha mendobrak penindasan dan eksplorasi terhadap perempuan di berbagai sektor (Wisnu dan Awaludin, 2022). Dalam konteks perempuan nelayan, dua pendekatan teori feminisme yang relevan adalah feminisme liberal dan ekofeminisme.

Feminisme liberal, atau dikenal juga sebagai “keadilan gender”, berfokus pada kesetaraan dalam peluang sosial, politik, ekonomi, serta kebebasan sipil dan seksual (Oxley, 2011). Teori ini menangani isu-isu seperti hak reproduksi, kekerasan terhadap perempuan, diskriminasi, dan kesetaraan upah (Morgan, 1996). Morgan (1996) mengidentifikasi dua tema utama dalam feminisme liberal: peran gender dan ideologi feminis. Peran gender mencerminkan keinginan agar laki-laki dan perempuan bebas memilih jalan hidup tanpa dibatasi peran yang ditentukan oleh gender. Ideologi feminis mendukung kesetaraan hak bagi perempuan, pengakuan adanya diskriminasi berbasis gender, dan aksi kolektif untuk perubahan.

Feminis liberal berjuang untuk membebaskan perempuan dari peran gender yang opresif, dengan menekankan pentingnya pendidikan androgini yang mencakup dimensi maskulin dan feminin, baik di sekolah maupun di rumah. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan tidak ada diskriminasi terhadap perempuan dalam hal penghasilan, pelecehan seksual, pemerkosaan, dan kekerasan (ASPPUK, 2012). Dalam konteks perempuan nelayan, feminisme liberal dapat membantu mengatasi stereotip gender yang membatasi mereka hanya pada pekerjaan tertentu dalam industri perikanan yang dianggap kurang penting atau ringan. Pendekatan ini mendorong kesetaraan hak, penghapusan stereotip pekerjaan, dan perlindungan dari pelecehan serta kekerasan, sambil memastikan perempuan nelayan memiliki akses yang adil terhadap sumber daya dan pendapatan. Mereka juga dapat meminta hak untuk memiliki kapal sendiri, mengakses fasilitas perikanan, dan berpartisipasi dalam keputusan yang berdampak pada kehidupan nelayan (Wirasandi, 2019).

Teori feminis lain sebagai landasan memperkuat posisi perempuan nelayan adalah ekofeminisme. Teori ini mengkritik struktur patriarkal yang mensubordinasi perempuan dan alam, dan menyoroti bagaimana perempuan nelayan sering kali dianggap sebagai sumber daya pasif yang bebas dieksplorasi demi kepentingan laki-laki, baik dalam aktivitas nelayan maupun pengelolaan sumber daya alam. Ekofeminisme berfokus pada pemberdayaan perempuan dalam pengelolaan lingkungan, dengan mengadvokasi keadilan lingkungan dan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan (Muryani, 2017). Dalam konteks ini, ekofeminisme mendukung pemberdayaan perempuan nelayan untuk mengambil keputusan dan berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam, serta memperjuangkan hak-hak mereka dalam mengakses sumber daya alam, mengelola kegiatan nelayan secara berkelanjutan, dan mempromosikan praktik nelayan yang ramah lingkungan.

Kedua pendekatan feminisme tersebut memberikan landasan pemikiran yang kokoh untuk menganalisis dan mengatasi ketidaksetaraan gender yang dihadapi perempuan nelayan. Feminisme liberal menekankan pada perlindungan hukum, kesetaraan hak, dan penghapusan diskriminasi, sementara ekofeminisme menyoroti pentingnya keadilan lingkungan dan kesetaraan dalam pengelolaan sumber daya alam. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, perempuan nelayan dapat diberdayakan untuk berperan lebih aktif dalam industri perikanan, sekaligus mengurangi eksplorasi dan mendukung praktik yang lebih berkelanjutan.

Perempuan sebagai Kunci Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan di Indonesia dirumuskan dalam UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutu, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Inti dari ketahanan pangan adalah bagaimana seluruh lapisan masyarakat secara merata dapat dengan mandiri memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas (Adawiyah, dkk., 2021).

Perempuan Indonesia memiliki peranan yang penting dalam melakukan kegiatan-kegiatan di setiap komponen



ketahanan pangan, dari penyediaan, akses dan pemanfaatan pangan bagi semua anggota keluarga. Perempuan tidak hanya bekerja di sektor domestik untuk melaksanakan pekerjaan rumah tangga, melainkan juga bekerja untuk mendapatkan uang yang dominan akan dipakai untuk pemenuhan keperluan rumah tangga. Hal tersebut juga menyangkut pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga (Kurniawati, 2017; Diyata dkk., 2018; Shamadiyah, 2018; Rostiyati, 2018; Hayati dkk., 2019; Hayati, dkk., 2020; Najmi dan Fitrisia, 2019 dalam Hayati, 2023).

Perempuan nelayan berkontribusi secara substansial terhadap ketahanan pangan dan mata pencaharian dengan mengisi kekurangan pendapatan rumah tangga dan pasokan makanan. Dalam beberapa kasus, mereka juga berperan sebagai penyedia utama protein dan pendapatan rumah tangga. Selain itu, berdasarkan penelitian *Union of the Comoros* (2005), perempuan tidak menjadi subjek yang rentan terhadap kemiskinan dibanding laki-laki. Hal ini disebabkan adanya kesediaan perempuan untuk bekerja dalam berbagai kegiatan yang menghasilkan pendapatan dan subsisten serta kecenderungan yang lebih besar bagi perempuan untuk mengalihkan pendapatannya kembali ke rumah tangga (FAO, 1997 dalam Hauzer, dkk., 2013).

Peran penting perempuan nelayan dalam peningkatan pendapatan rumah tangga juga terlihat dari kontribusi mereka melalui berbagai pekerjaan, seperti berjualan ikan, es batu, atau minuman dingin. Pekerjaan ini membantu mengangkat kesejahteraan keluarga dengan menambah penghasilan dari hasil kerja mereka (Kurniawati, 2017). Fenomena ini menunjukkan bahwa peran ganda perempuan sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah dapat berjalan seiring untuk membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga (Doriza, 2015 dalam Maulida, Safrida, dan Marefanda, 2020). Teori yang dikemukakan Purwanto (2020) mendukung pandangan ini, di mana keterlibatan istri nelayan dalam pekerjaan berpenghasilan dapat meringankan beban suami dalam mencari nafkah dan memperkuat kehidupan rumah tangga mereka karena kebutuhan keluarga lebih terpenuhi (Nurhaliza, Akhmad Mansyur, dkk., 2024). Dengan demikian, dapat disimpulkan, perempuan nelayan memegang peran sentral dalam menjaga ketahanan ekonomi rumah tangga mereka melalui partisipasi aktif dalam berbagai kegiatan ekonomi sekaligus memperkuat dan mempertahankan kehidupan rumah tangga mereka.

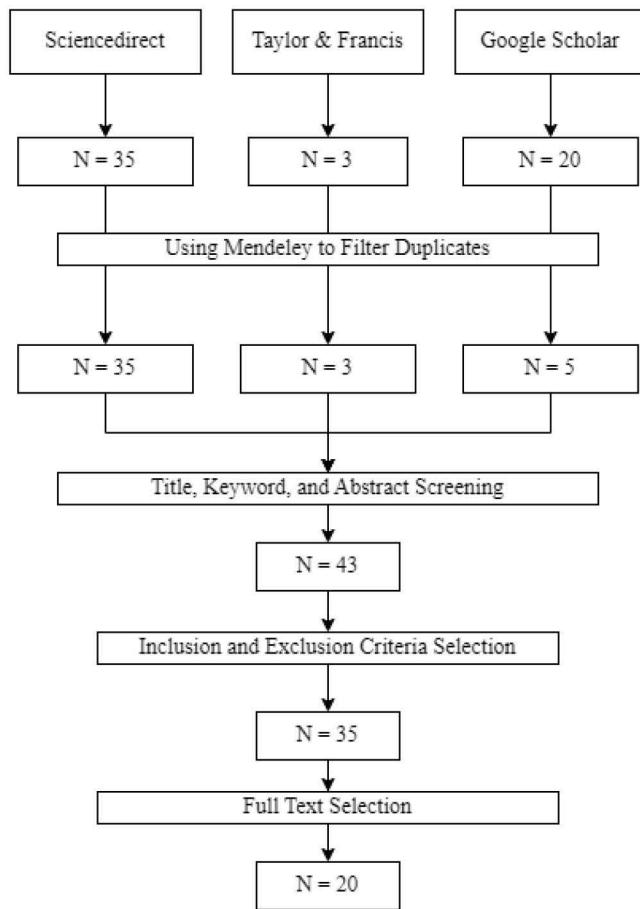
Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan *literature review* untuk mencari bukti-bukti mengenai eksistensi perempuan nelayan. Proses ini dilakukan melalui beberapa langkah: 1) Penentuan strategi pencarian artikel; 2) Pencarian artikel; 3) Penyesuaian artikel melalui kriteria yang memenuhi syarat; 4) Menyeleksi artikel; dan 5) Merangkum hasil pencarian artikel. Pencarian artikel dilakukan oleh tiga orang dan berlangsung selama empat minggu. Pencarian dilakukan di tiga *database*, yaitu Sciencedirect, Taylor and Francis, dan Google Scholar. Strategi pencarian di masing-masing *database* terdapat pada Tabel 1.

Proses pemilihan artikel dilakukan melalui kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan oleh kelompok dalam pembuatan makalah ini. Adapun kriteria inklusi yang ditetapkan, di antaranya: artikel *review* dan penelitian primer; berbahasa Indonesia atau Inggris; artikel yang diterbitkan dalam 10 tahun terakhir (2014–2024); dan studi yang digunakan berkaitan dengan perempuan nelayan, ketahanan pangan, dan intervensi gender. Sedangkan kriteria eksklusi yang diterapkan adalah: teks lengkap tidak tersedia; studi yang tidak lengkap; buku atau ensiklopedia; dan menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia atau Inggris.

Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, diperoleh 58 artikel dalam tiga database. Telah dipastikan tidak terjadi duplikasi artikel melalui aplikasi Mendeley. Langkah pertama untuk menyeleksi artikel adalah melihat abstrak dan menyesuaikan artikel dengan kriteria yang telah ditentukan sehingga hasil sementara sebanyak 35 artikel. Langkah kedua untuk menyeleksi artikel adalah memastikan topik artikel sesuai dengan tema yang dipaparkan dan dilakukan pengecekan ulang oleh tiga orang dalam tim paper ini sehingga hasil akhir sebanyak 20 artikel (Gambar 1 tentang *Diagram Alir Strategi Pencarian*). Setelah dilakukan penyaringan terhadap artikel-artikel yang ditemukan, maka terpilihlah 20 artikel yang akan dijadikan sebagai artikel referensi dalam mensintesiskan gagasan tentang pemberdayaan perempuan nelayan di berbagai negara. Rangkuman artikel-artikel tersebut disajikan pada lampiran.





Tabel 1. Diagram Alir Strategi Pencarian

Hasil Penelitian

Pentingnya Pemberdayaan Perempuan Nelayan dalam Mendukung Ketahanan Pangan

Pemberdayaan nelayan perempuan sangat penting untuk mendukung ketahanan pangan, karena hal ini meningkatkan partisipasi dan pengambilan keputusan mereka dalam perikanan, yang mengarah pada peningkatan produktivitas dan pendapatan (Freeman & Svels, 2022). Menurut Lentisco & Lee (2015), perempuan memainkan peran penting dalam perikanan, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ketahanan pangan dan ekonomi lokal. Partisipasi mereka dalam berbagai segmen rantai nilai ikan, termasuk produksi, distribusi, dan pemasaran, sangat penting untuk keberhasilan sektor ini. Peningkatan partisipasi perempuan dalam perikanan dan akuakultur mengarah pada produktivitas yang lebih tinggi dan peningkatan pendapatan, seperti yang terlihat pada industri salmon di Chili, di mana tenaga kerja perempuan berkontribusi pada perluasannya (Adam, dkk., 2024). Pemberdayaan perempuan nelayan juga meningkatkan status sosial dan ekonomi mereka, meningkatkan akses mereka ke alat dan layanan produktif. Hal ini, pada gilirannya, meningkatkan partisipasi dan pengambilan keputusan mereka dalam pengelolaan sumber daya perikanan, yang sangat penting untuk perikanan skala kecil yang berkelanjutan. Selain itu, mengatasi pengucilan sosial dengan mengakui dan menghargai kontribusi nelayan perempuan sangat penting untuk kelangsungan hidup mereka dan keberlanjutan perikanan. Dengan memberdayakan mereka, kita dapat memastikan bahwa kontribusi mereka diakui, dihargai, dan dimanfaatkan secara efektif untuk mendukung ketahanan pangan dan pembangunan ekonomi lokal.

Dampak Program CSR terhadap Perempuan Nelayan

Program Corporate Social Responsibility (CSR) memiliki beberapa dampak positif untuk perempuan nelayan di Indonesia, di antaranya, adalah:

Temuan Dampak	Program
Peningkatan ekonomi	Program CSR seperti "Pertamina Sahabat Nelayan" telah meningkatkan perekonomian keluarga perempuan nelayan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini memberikan peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya ibu-ibu nelayan waduk, dengan meningkatkan nilai jual ikan dan memanfaatkan bahan baku lokal ikan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat (Alfiansyah, 2023).
Pemberdayaan wanita	Program CSR juga dapat berfungsi sebagai program pemberdayaan perempuan. Misalnya, program CSR yang dilakukan oleh PT Unilever telah diarahkan untuk melihat hubungan antara tingkat keberhasilan program CSR dengan tingkat keberdayaan perempuan pedesaan. Meskipun hasil penelitian menunjukkan tidak ada hubungan langsung antara keduanya, program CSR masih dapat meningkatkan aspek sosial dan tidak ekonomi (Rezeki dan Nasdian, 2020).
Keterampilan dan kesadaran	Implementasi praktik CSR oleh PT Pertamina Hulu telah meningkatkan keterampilan dan kesadaran wanita nelayan. Hasil yang dirasakan oleh nelayan dari program ini adalah meningkatnya perekonomian keluarga, meningkatnya keterampilan, dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan (Asmoro, Nurwafi, dan Shintadewi, 2023).
Kesejahteraan sosial	CSR juga berfokus pada kesejahteraan sosial masyarakat. Program CSR yang dilakukan oleh beberapa perusahaan di Indonesia telah diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat baik sebagai objek maupun sebagai subjek program CSR.

Kesimpulan

Perempuan nelayan memainkan peran penting dalam pembangunan pesisir, khususnya melalui peran mereka dalam ketahanan pangan lingkungan pesisir. Namun demikian, perempuan nelayan mengalami marjinalisasi dan pengucilan dari program pemberdayaan yang seharusnya mereka terima di masyarakat secara umum. Pemerintah turut melanggengkan diskriminasi berbasis gender dengan tidak memberikan akses yang sama terhadap program perlindungan dan pemberdayaan bagi perempuan nelayan. Selain itu, UU tidak mencakup ketentuan yang membahas kebutuhan dan tantangan khusus yang dihadapi oleh perempuan nelayan, sehingga mereka tidak cukup dilindungi atau diberdayakan dalam industri perikanan. Studi ini telah mengumpulkan berbagai penelitian yang diselenggarakan di beberapa negara tentang pemberdayaan perempuan nelayan, lalu menyintesisnya menjadi sebuah strategi, yakni *Fisherwomen's Inclusive Network for Growth and Sustainability* (WINGS). Dengan pendekatan yang holistik dan partisipatif, program WINGS diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan dalam pemberdayaan perempuan nelayan di Indonesia. Program ini tidak hanya akan memperkuat peran perempuan nelayan dalam pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi mereka, serta memperkuat posisi mereka dalam komunitas dan dalam pembuatan kebijakan publik yang lebih inklusif.

Rekomendasi Lanjutan: *Fisherwomen's Inclusive Network for Growth and Sustainability* (WINGS)

Pemberdayaan perempuan nelayan di Indonesia merupakan isu strategis yang memerlukan perhatian serius, mengingat peran sentral mereka dalam mendukung ketahanan pangan dan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Untuk itu, program *Fisherwomen's Inclusive Network for Growth and Sustainability* (WINGS)



dirancang sebagai inisiatif untuk memberdayakan perempuan nelayan melalui penguatan jejaring sosial, peningkatan kapasitas, serta pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Rekomendasi kebijakan yang diusulkan melalui program ini menekankan pada pendekatan holistik yang melibatkan peningkatan kompetensi kognitif, psikomotorik, dan afektif perempuan nelayan.

1. Peningkatan Kompetensi Kognitif: Menggabungkan Pengetahuan Tradisional dan Ilmu Pengetahuan Modern

Proses pemberdayaan perempuan nelayan harus dimulai dengan memperkuat kompetensi kognitif mereka, yaitu kemampuan untuk memahami dan menggabungkan pengetahuan tradisional dengan informasi ilmiah yang lebih maju. Perempuan nelayan memiliki pemahaman mendalam tentang lingkungan laut dan perikanan yang diwariskan secara turun-temurun. Namun, tantangan lingkungan dan ekonomi yang semakin kompleks menuntut pengayaan pengetahuan ini dengan wawasan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).

Sebagai bagian dari kebijakan ini, pemerintah dan mitra pembangunan perlu merancang program pelatihan yang berkelanjutan dan inklusif. Program ini harus mencakup modul-modul yang mengajarkan perempuan nelayan cara membaca data lingkungan, memahami perubahan iklim, dan mengaplikasikan teknologi ramah lingkungan dalam kegiatan perikanan. Misalnya, pelatihan tentang penggunaan perangkat teknologi sederhana seperti alat pemantau cuaca dan aplikasi ponsel yang dapat membantu mereka dalam memprediksi kondisi laut dan cuaca.

Proses implementasi pelatihan ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat sipil yang memiliki pengalaman dalam bidang kelautan. Keterlibatan universitas dan lembaga penelitian juga penting untuk memastikan bahwa materi pelatihan selalu up-to-date dengan perkembangan IPTEK terbaru. Selain itu, pendekatan ini harus inklusif, mempertimbangkan tingkat pendidikan yang beragam di antara perempuan nelayan, serta menggunakan metode yang partisipatif dan kontekstual.

2. Penguatan Kompetensi Psikomotorik: Pengelolaan Sumber Daya Laut Berbasis Komunitas

Kebijakan berikutnya menitikberatkan pada peningkatan kompetensi psikomotorik perempuan nelayan, yang mencakup keterampilan praktis dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan. Proses ini dapat dimulai dengan menerapkan model pengelolaan perairan laut yang dikelola secara lokal oleh masyarakat pesisir, di mana perempuan nelayan berperan aktif.

Pemerintah perlu mendukung pembentukan dan penguatan kelompok-kelompok pengelola sumber daya laut yang dipimpin oleh perempuan nelayan. Kelompok-kelompok ini akan menjadi pelopor dalam pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, dengan memanfaatkan pengetahuan lokal yang mereka miliki dan memperkaya dengan informasi ilmiah yang diperoleh dari pelatihan. Misalnya, mereka dapat dilatih dalam teknik budidaya perikanan yang ramah lingkungan, pengelolaan sampah plastik di laut, serta perlindungan ekosistem pesisir seperti mangrove dan terumbu karang.

Untuk mendukung proses ini, kebijakan perlu mengalokasikan anggaran khusus bagi pembangunan infrastruktur yang mendukung kegiatan kelompok ini, seperti tempat pelatihan, fasilitas pengolahan hasil laut, dan akses ke pasar. Pemerintah juga dapat bekerja sama dengan LSM, sektor swasta, dan lembaga donor untuk menyediakan pendanaan dan bantuan teknis yang diperlukan.

Selain itu, kebijakan ini juga mencakup pengembangan kerangka kerja ekologi politik yang fokus pada masyarakat pesisir. Kerangka kerja ini akan memberikan analisis yang mendalam tentang dampak sosial-ekonomi dari kegiatan perikanan yang dilakukan oleh perempuan nelayan, serta membantu mengidentifikasi strategi kebijakan yang dapat memperkuat keberlanjutan sosial dan ekonomi di wilayah pesisir. Proses ini melibatkan penelitian dan pemetaan partisipatif yang melibatkan perempuan nelayan dalam pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka.

3. Penguatan Kompetensi Afektif: Advokasi dan Keadilan Sosial

Di samping penguatan kompetensi kognitif dan psikomotorik, program WINGS juga menekankan pentingnya penguatan kompetensi afektif perempuan nelayan, yaitu kemampuan mereka untuk mengakses



hak-hak mereka, memperjuangkan keadilan, dan memperkuat solidaritas dalam komunitas mereka. Penguatan ini dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas perempuan nelayan dalam mengakses peradilan, informasi, dan memperkuat advokasi berbasis kelompok sipil.

Salah satu langkah strategis adalah memperkuat mekanisme pengaduan dan akses peradilan bagi perempuan nelayan yang mengalami pelanggaran hak, seperti eksplorasi tenaga kerja, kekerasan berbasis gender, atau diskriminasi dalam akses terhadap sumber daya. Pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum dan LSM untuk menyediakan layanan hukum yang terjangkau dan mudah diakses oleh perempuan nelayan, serta melakukan sosialisasi tentang hak-hak mereka.

Di samping itu, kebijakan ini juga mendorong pembentukan kelompok-kelompok advokasi berbasis komunitas yang dipimpin oleh perempuan nelayan. Kelompok ini akan berfungsi sebagai platform untuk memperjuangkan hak-hak perempuan nelayan, menyuarakan aspirasi mereka, serta membangun jejaring dengan kelompok advokasi lainnya di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Proses ini dapat difasilitasi melalui pelatihan advokasi, pemberdayaan media sosial, dan penguatan jejaring antar kelompok.

Selain aspek advokasi, kebijakan ini juga mencakup strategi peningkatan ekonomi melalui pemanfaatan teknologi digital. Pemerintah dan mitra terkait perlu mendorong pengembangan platform online untuk pemasaran produk perikanan yang dihasilkan oleh perempuan nelayan. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan akses mereka ke pasar yang lebih luas, tetapi juga memberikan peluang bagi mereka untuk meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan. Dalam proses ini, perempuan nelayan perlu dilatih tentang penggunaan teknologi digital, manajemen bisnis, dan pemasaran *online* sehingga mereka dapat mengelola usaha mereka secara mandiri dan berdaya saing.

4. Promosi Metrik Gender dan Disagregasi Data untuk Pengukuran Kontribusi

Untuk memastikan bahwa kebijakan ini berjalan dengan efektif dan dapat memberikan dampak yang diinginkan, penting untuk menerapkan metrik gender dalam pelacakan kontribusi perempuan nelayan dalam berbagai peran dan kemajuan karir mereka. Kebijakan ini merekomendasikan penggunaan data disagregasi berbasis gender untuk mengukur kontribusi ekonomi dan sosial dari kegiatan kelautan yang dilakukan oleh perempuan nelayan. Data ini akan memberikan gambaran yang lebih akurat tentang dampak program WINGS, serta membantu dalam penyusunan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan perempuan nelayan.

Proses pengumpulan data ini dapat dilakukan melalui survei, wawancara, dan pemetaan partisipatif yang melibatkan perempuan nelayan sebagai subjek utama. Pemerintah, akademisi, dan lembaga penelitian perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan relevan, valid, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan kebijakan yang tepat. Program WINGS diharapkan dapat meningkatkan pemberdayaan perempuan nelayan di Indonesia melalui pendekatan holistik dan partisipatif. Program ini akan meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi perempuan nelayan, memperkuat posisi mereka dalam komunitas dan berkontribusi pada kebijakan publik yang lebih inklusif.

Daftar Pustaka

Adam, R. I., Sufian, F. D., dan Njogu, L. (2024). The Status of Women's Empowerment in the Aquaculture Sector in Kenya. *International Journal of Development Issues*, 23(1), 142–165. <https://doi.org/10.1108/ijdi-04-2023-0087>

Admin. (2012, April 26). Feminisme Liberal. ASPPUK. <https://asppuk.or.id/2012/04/feminisme-liberal/>

Alfiansyah, A. A. (2023). Peran Corporate Social Responsibility (CSR) PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Boyolali dalam Pemberdayaan Keluarga Nelayan Waduk Kedung Omboh. *Biokultur*, 12(2), 95-104.

Anggraini, Y. (2020). Peran Perempuan Masyarakat Pesisir Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Nelayan di Desa Bayah Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 13(1), 97-106. Retrieved from <https://jkpjournal.com/index.php/menu/article/view/92>



Asmoro, A., Nurwafi, L., dan Shintadewi, M. (2023). Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat pada Program Corporate Social Responsibility (CSR) Pertamina Sahabat Nelayan PT Pertamina Patra Niaga It Semarang. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(8), 1751–1760.

Asrinaldi. (2022). Pendekatan Interseksionalitas dalam Memahami Relasi Gender dan Kekuasaan di Indonesia. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, 21(1), 1-15. <https://ejurnal.uin-suska.ac.id/index.php/marwah/article/view/9633/5298>

Awalia, H., dan Hamdi, S. (2023). Perangkap Kemiskinan pada Perempuan Pesisir Pantai Cemara Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya*, 25(2), 128–151. <https://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal/article/view/840/155>

Axelrod, M., Vona, M., Colwell, J. N., Fakoya, K., Salim, S. S., Webster, D., dan De La Torre-Castro, M. (2022). Understanding Gender Intersectionality for more Robust Ocean Science. *Earth System Governance*, 13, 100148. <https://doi.org/10.1016/j.esg.2022.100148>

Cormier-Salem, M. C. (2024). Desirable futures: Perspectives of Joola fisherwomen in Casamance, Senegal. *Futures*, 162, 103435. <https://doi.org/10.1016/j.futures.2024.103435>

Courtney, C. A., Pomeroy, R., & Brooks, S. H. (2019). Taking Stock of the Status of Implementation of the Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-scale Fisheries: A Country-level Assessment Framework. *Marine Policy*, 100, 361–370. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2018.12.005>

Damsiki, N. (2018b). Peranan Perempuan dalam Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Nelayan di Desa Maitara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 4(2). <http://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/29>

De Carvalho, D. A., Amaral, S., & Alves, L. M. (2023). Climate Change Adaptation Frameworks in Fishing Communities: A Systematic Review. *Ocean & Coastal Management*, 243, 106754. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2023.106754>

De Oliveira Estevo, M., Lopes, P. F., De Oliveira Júnior, J. G. C., Junqueira, A. B., De Oliveira Santos, A. P., Da Silva Lima, J. A., Malhado, A. C. M., Ladle, R. J., & Campos-Silva, J. V. (2021). Immediate Social and Economic Impacts of a Major Oil Spill on Brazilian Coastal Fishing Communities. *Marine Pollution Bulletin*, 164, 111984. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2021.111984>

Dias, A. C. E., Armitage, D., Nayak, P. K., Akintola, S. L., Arizi, E. K., Chuenpagdee, R., Das, B. K., Diba, S. A., Ghosh, R., Isaacs, M., Islam, G. M. N., Kane, A., Li, Y., Manase, M. M., Mbaye, A. A., Onyango, P., Pattanaik, S., Sall, A., Susilowati, I., Singh, S. (2023). From Vulnerability to Viability: A Situational Analysis of Small-Scale fisheries in Asia and Africa. *Marine Policy*, 155, 105731. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2023.105731>

Fajar, J. (2017, September 13). *Sudahkah Perempuan Nelayan Diakui dalam Sektor Kelautan dan Perikanan?* - Mongabay.co.id. Mongabay.co.id. <https://www.mongabay.co.id/2017/09/13/sudahkah-perempuan-nelayan-diakui-dalam-sektor-kelautan-dan-perikanan/>

Fajar, J. (2019, June 3). Perempuan Nelayan, Profesi Berat tanpa Pengakuan Negara. Ada Apa? Mongabay.co.id. <https://www.mongabay.co.id/2019/06/03/perempuan-nelayan-profesi-berat-tanpa-pengakuan-negara-ada-apa/>

Freeman, R., & Svels, K. (2022). Women's Empowerment in Small-scale Fisheries: The Impact of Fisheries Local Action Groups. *Marine Policy*, 136(104907), 104907. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2021.104907>

Gatta, P. P. (2022). The State of World Fisheries and Aquaculture 2022. FAO eBooks. <https://doi.org/10.4060/cc0461en>

Gina, Abby. Negara Abai terhadap Kapabilitas Perempuan Petambak di Dipasena Lampung. (n.d.). *Jurnal Perempuan*. <https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/abby-gina-negara-abai-terhadap-kapabilitas-perempuan-petambak-di-dipasena-lampung>

Gustavsson, M., Frangouides, K., Lindström, L., Burgos, M. C. L., & De La Torre-Castro, M. (2021). Gender and Blue Justice in Small-scale Fisheries Governance. *Marine Policy*, 133, 104743. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2021.104743>

Hadi, F. I. (2021). Pemberdayaan Masyarakat melalui Pembangunan Desa Wisata Berbasis Komunitas di Lombok Barat. *Jurnal Bestari*, 1(1), 12-24. <https://jurnalbestari.ntbprov.go.id/index.php/bestari1/article/view/62>

Hayati, & Sahidu, A. (2023). Karakteristik Personal Perempuan Nelayan dan Indeks Ketahanan Pangan Rumah



Tangga di Lombok Barat. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 9(1). <https://jseh.unram.ac.id/index.php/jseh/article/view/311/158>

Hayati, H. (2023). Perilaku Perempuan Nelayan dalam Mendukung Ketahanan Pangan Rumah Tangga di Lombok Barat. *AGROTEKSOS: Agronomi Teknologi Dan Sosial Ekonomi Pertanian*, 33(1), 100. <https://doi.org/10.29303/agroteksos.v33i1.799>

Infrastructure Improvement for Shrimp Aquaculture Project (INO RRP 55020-001). (2022). <https://www.adb.org/sites/default/files/linked-documents/55020-001-ld-06.pdf>

Istiana, I. (2014, June 30). Akses Perempuan Nelayan dalam Kegiatan Produktif (Studi Kasus di Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten). *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*. <http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/mra/article/view/205/208>

Istiana, I. (2014b). Akses Perempuan Nelayan dalam Kegiatan Produktif (Studi Kasus di Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten). *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 9(1), 1. <https://doi.org/10.15578/marina.v9i1.205>

Istiana, I. (2014c). Akses Perempuan Nelayan dalam Kegiatan Produktif (Studi Kasus di Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten). *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 9(1), 1. <https://doi.org/10.15578/marina.v9i1.205>

Kadfak, A., & Oskarsson, P. (2020). An (Urban) Political Ecology approach to Small-Scale Fisheries in the Global South. *Geoforum*, 108, 237–245. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2019.11.008>

Koral. (2022, December 5). *Perempuan Nelayan di Pesisir Indonesia Masih Terpinggirkan*. KORAL. <https://koral.info/id/perempuan-nelayan-di-pesisir-indonesia-masih-terpinggirkan/>

Koralagama, D., Gupta, J., & Pouw, N. (2017). Inclusive Development from a Gender Perspective in Small Scale Fisheries. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 24, 1–6. <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2016.09.002>

Lau, J. D., Cinner, J. E., Fabinyi, M., Gurney, G. G., & Hicks, C. C. (2020). Access to Marine Ecosystem Services: Examining Entanglement and Legitimacy in Customary Institutions. *World Development*, 126, 104730. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.104730>

Lekshmi, P. S., Radhakrishnan, K., Narayananakumar, R., Vipinkumar, V., Parappurathu, S., Salim, S. S., Johnson, B., & Pattnaik, P. (2022). Gender and small-scale fisheries: Contribution to Livelihood and Local Economies. *Marine Policy*, 136, 104913. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2021.104913>

Lentisco, A., & Lee, R. U. (2015). A Review of Women's Access to Fish in Small-Scale Fisheries. Rome: Food & Agriculture Organization of The United Nations.

Maritime Affairs and Fisheries. (2024, July 17). European Institute for Gender Equality. https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/maritime-affairs-and-fisheries?language_content_entity=en

Matovu, B., Lukambagire, I., Mwabvu, B., Manianga, A., Alkoyak-Yildiz, M., S. N., Jabbi, B., & Etta, L. A. (2024). Co-Designing Transformative Ocean Sustainability Narratives to Address Complex Human-Environmental Challenges Facing Coastal Fisherwomen: An Evidence-Based Study. *Environmental Challenges*, 15, 100923. <https://doi.org/10.1016/j.envc.2024.100923>

Michalena, E., Straza, T. R., Singh, P., Morris, C. W., & Hills, J. M. (2020). Promoting Sustainable and Inclusive Oceans Management in Pacific Islands through Women and Science. *Marine Pollution Bulletin*, 150, 110711. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2019.110711>

Murunga, M. (2021). Towards a Better Understanding of Gendered Power in Small Scale Fisheries of the Western Indian Ocean. *Global Environmental Change*, 67, 102242. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2021.102242>

Muryani, D. (2017). Ekofeminisme: Perempuan dan Permasalahan Lingkungan. Dalam *Buku 1*. Indomedia Pustaka. https://repository.unair.ac.id/95355/8/801_Karil_Muryani_Ekofeminisme.pdf

Mutimukuru-Maravanyika, T., Mills, D. J., Asare, C., & Asiedu, G. A. (2017). Enhancing Women's Participation in Decision-Making in Artisanal Fisheries in the Anlo Beach Fishing Community, Ghana. *Water Resources and Rural Development*, 10, 58–75. <https://doi.org/10.1016/j.wrr.2016.04.001>

Nakamura, J., Chuenpagdee, R., dan Halimi, M. E. (2021). Unpacking Legal and Policy Frameworks: A Step Ahead



for Implementing the Small-Scale Fisheries Guidelines. *Marine Policy*, 129, 104568. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2021.104568>

Napitupulu, L. (n.d.). 3 Reasons Why Women in Fisheries Matter for An Inclusive Economic Recovery. *WRI Indonesia*. <https://wri-indonesia.org/en/insights/3-reasons-why-women-fisheries-matter-inclusive-economic-recovery>

Nurhaliza, M. A., & Rosmawanti, dkk., (2024). Peran Istri Nelayan dalam Membangun Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga di Kabupaten Bulukumba. *Jurnal Perikanan Pantura (JPP)*, 7(1). <https://journal.umg.ac.id/index.php/jpp/article/download/5342/4048/>

O'Neill, E. D., & Crona, B. (2017). Assistance Networks in Seafood Trade: A Means to Assess Benefit Distribution in Small-Scale Fisheries. *Marine Policy*, 78, 196–205. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2017.01.025>

Olufemi, J. O., & Daniella, F. S. (2019). Women Involvement in the Fishery Activities of Two Coastal Communities in Sierra Leone. *African Journal of Agricultural Research*, 14(5), 279–286. <https://doi.org/10.5897/ajar2018.13574>

Purcell, S. W., Tagliafico, A., Cullis, B. R., & Cocks, N. (2024). Wicked Problem of Improving Fishery Livelihoods through Capacity Building. *Marine Policy*, 163, 106108. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2024.106108>

Purwanti, A., Wijaningsih, D., dan Setiawan, F. (2021). Assessing Fishery Legislation for Gender Equality and Empowerment in Fishery Communities in Indonesia. *Diponegoro Law Review*, 06(02). <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dlr/article/download/41631/20264>

Ratner, B. D., Åsgård, B., dan Allison, E. H. (2014). Fishing for Justice: Human Rights, Development, and Fisheries Sector Reform. *Global Environmental Change*, 27, 120–130. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2014.05.006>

Rezeki, S., dan Nasdian, F. T. (2020). Hubungan Keberhasilan Program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Unilever dengan Keberdayaan Perempuan Pedesaan. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 4(2), 261–274. <https://doi.org/10.29244/jskpm.4.2.261-274>

Samoilys, M. A., Osuka, K., Mussa, J., Rosendo, S., Riddell, M., Diade, M., Mbugua, J., Kawaka, J., Hill, N., dan Koldewey, H. (2019). An Integrated Assessment of Coastal Fisheries in Mozambique for Conservation Planning. *Ocean & Coastal Management*, 182, 104924. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2019.104924>

Saputra, I. P. W., & Hasrin, A. (2022). Dekonstruksi Ideologi Feminisme pada Kehidupan Perempuan Pesisir Pantai Hyatt, Sanur-Bali. *PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education*, 3(2), 95-104. <https://doi.org/10.53682/jpjssre.v3i2.5577>

Silviyana, I. (2023). Peran Perempuan Pengusaha UMKM dalam Pemberdayaan Perempuan Nelayan di Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu. *Biokultur*, 12(1), 37–44. <https://e-journal.unair.ac.id/BIOKULTUR/article/download/40204/25270>

Sinay, J. F. M. (2023). Gender dan Etnografi: Mengurai Tatanan Kehidupan Perempuan Seram Timur dalam Perspektif Antropologi Feminis. *Papalele: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Budaya*, 7(1), 59-74. <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/papalele/article/view/4837/3641>

Susanto, E. (2022). Kebijakan Perlindungan Sosial bagi Anak Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Sosio Informa: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8(3), 85-98. <https://ejurnal.poltekkesos.ac.id/index.php/Sosioinforma/article/view/2664/1500>

UU No. 7 Tahun 2016. (n.d.). Database Peraturan | JDIH BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37237/uu-no-7-tahun-2016>

Wahyuni, S., Niko, N., dan Elsera, M. (2022). Self-Agency Perempuan Nelayan di Kampung Bulang, Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau. *Jurnal Bestari*, 3(1), 48–59. <https://jurnalbestari.ntbprov.go.id/index.php/bestari1/article/view/62>

Wijaya, P. (2023). Peran Penyuluhan Pertanian dalam Meningkatkan Produktivitas Padi Sawah di Lombok Barat. *Agroteksos: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 10(2), 143-153. <https://agroteksos.unram.ac.id/index.php/Agroteksos/article/view/799/213>

Wirasandi. (2019). Wanita dalam Pendekatan Feminisme. *Jurnal Ilmiah Rinjani*, 7(2). <https://jurnal.ugr.ac.id/index.php/jir/article/download/122/86>



Wulan, R. P. (2021). Strategi Adaptasi Ekonomi Rumah Tangga Petani Cabai di Kabupaten Garut. *Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Publik*, 5(2), 99-109. <https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jpls/article/view/4758/2202>

Wulandari, N., Indrianti, D., & Hilmi, I. (2022). Analisis Gender Peran Perempuan Pesisir Pada Ketahanan Pangan Keluarga di Desa Puger Kulon Kabupaten Jember. *Jurnal Universitas Siliwangi*, 7(1), 52–60. <https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jpls/article/download/4758/2202>

Lampiran

Tabel 1.1 Hasil Literature Review

No	Author	Title	Type of Literature	Country	Strategy Arise
1.	Baker Matovu, Isaac Lukambangire, et al	Co-designing Transformative Ocean Sustainability Narratives to Address Complex Human-environmental Challenges Facing Coastal Fisherwomen: An Evidence-based Study	Qualitative and Systematic Literature Review (SLR)	India	<ul style="list-style-type: none"> Peneliti menggabungkan wawasan dari narasi perempuan nelayan dan literatur untuk mengembangkan narasi transformatif.
2.	Jacqueline, Joshua, et al	Access to marine ecosystem services: Examining entanglement and legitimacy in customary institutions	Qualitative Research	Papua New Guinea	<ul style="list-style-type: none"> Peneliti menyarankan ecosystem services harus memperhatikan perubahan serta perubahan yang lebih tiba-tiba dalam legitimasi yang dihasilkan oleh intervensi formal yang didasarkan pada jasa ekosistem seperti pembayaran untuk layanan ekosistem. Mengevaluasi legitimasi serta penyimpangan dapat memperluas perlakuan layanan ekosistem tentang kekuatan dengan menggabungkan pendekatan relasional dan struktural.
3.	Melita, Kennedy, et al.	An integrated assessment of coastal fisheries in Mozambique for conservation planning	Qualitative and Quantitative Research	Mozambique	<ul style="list-style-type: none"> Menyarankan penggunaan model pengelolaan perairan laut yang dikelola secara lokal (LMMA) yang dijalankan oleh masyarakat untuk meningkatkan perikanan Penerapan pendekatan co-management untuk mengintegrasikan berbagai jenis data dan mengkonfirmasi keputusan manajemen yang didorong oleh pemangku kepentingan Penggunaan matriks kompatibilitas untuk menimbang biaya kesempatan terhadap manfaat konservasi dari berbagai langkah manajemen seperti zona larangan tangkap (NTZs), penutupan sementara, dan pembatasan atau modifikasi perangkat tangkap.
4.	Alin Kadak, Patrik Oskarsson	An (Urban) Political Ecology approach to Small-Scale Fisheries in the Global South	Qualitative Research		<ul style="list-style-type: none"> Melalui pendekatan ekologi yang memungkinkan untuk lebih memahami bagaimana komunitas nelayan perkotaan menavigasi transformasi pesisir yang kompleks. Menggunakan kerangka kerja Ekologi Politik (Urban) memberikan pembelajaran analitis yang lebih baik untuk studi komunitas nelayan skala kecil di belahan dunia bagian selatan.
5.	Elizabeth, Beatrice.	Assistance networks in seafood trade – A means to assess benefit distribution in small-scale fisheries	Qualitative Research	Zanzibar	<ul style="list-style-type: none"> Pentingnya memahami jaringan bantuan dan hubungan sosial yang kompleks dalam perikanan skala kecil untuk pengambilan keputusan dan pengelolaan yang lebih berkelanjutan Menyerukan pendekatan yang mengakui koneksi antara perikanan dan relasi sosial non-finansial, yang dapat membantu dalam merancang kebijakan dan program pemberdayaan yang lebih efektif untuk masyarakat nelayan.
6.	Daniel, Silvana, et al	Climate change adaptation frameworks in fishing communities: A systematic review	Qualitative Research		<ul style="list-style-type: none"> Mendorong kolaborasi dan pengetahuan dengan lembaga di negara-negara selatan untuk meningkatkan pemahaman tentang local wisdom Mengadopsi pendekatan penelitian yang lebih inklusif dan kolaboratif, dapat menutup kesenjangan antara berbagai wilayah dan memastikan bahwa produksi pengetahuan dan teori tidak terbatas pada lokasi geografis tertentu. Menggunakan framework "Vulnerability", "Kedudukan pengetahuan lokal", dan "Adaptation and Resilience Framework" untuk memahami persepsi komunitas nelayan skala kecil tentang dampak perubahan iklim, memahami kerentanan masyarakat nelayan terhadap dampak perubahan iklim dengan mengevaluasi komponen berikut: paparan, sensitivitas, dan kemampuan beradaptasi, dan pemahaman bagaimana komunitas nelayan beradaptasi dan menahan perubahan iklim sesuai dengan interaksi antara stresor, dampak, dan komponen kapasitas adaptif.



No	Author	Title	Type of Literature	Country	Strategy Arise
7.	Marie Christine, Cornier Salem	Desirable futures: Perspectives of Joola fisherwomen in Casamance, Senegal	Qualitative Research	Senegal	<ul style="list-style-type: none"> Strategi adaptasi dan pengakuan identitas untuk mempertahankan sumber daya yang telah mereka miliki.
8.	Tendayi, David Mills, et al.	Enhancing women's participation in decision-making in artisanal fisheries in the Anlo Beach fishing community, Ghana	Qualitative and Quantitative Research	Ghana	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan penelitian dengan pendekatan participatory action-research untuk mengetahui pemahaman tentang bagaimana partisipasi perempuan dapat ditingkatkan Menyediakan ruang atau panel diskusi bagi para perempuan dengan pemerintah daerah terkait Mengembangkan intervensi kontekstual yang menangani semua kebutuhan pemangku kepentingan, seperti perempuan.
9.	Blake Ratner, Edward, et al.	Fishing for justice: Human rights, development, and fisheries sector reform	Qualitative Research		<ul style="list-style-type: none"> Memperkuat mekanisme untuk akses ke peradilan. Ini termasuk memperkuat mekanisme formal seperti pengadilan dan suruhan penyelesaian sengketa lainnya yang disponsori oleh negara, termasuk otoritas tradisional untuk mengelola tanah dan air, dan penciptaan platform untuk dialog multi-stakeholder dan untuk membantu alokasi sumber daya yang adil di antara sektor yang bersaing, sehingga menghindari pelanggaran hak melalui pengecualian. Memperkuat kapasitas kelompok advokasi masyarakat sipil Gerakan co-management perikanan berbasis komunitas dimulai terutama sebagai sarana untuk mengatasi kekhawatiran keadilan sosial, dan membantu memberikan alasan untuk pergeseran yang lebih umum menuju manajemen sumber daya alam yang terdesentralisasi
10.	Ana Carolina, Derek Armitage, et al.	From vulnerability to viability: A situational analysis of small-scale fisheries in Asia and Africa	Situational Analysis	Asia dan Afrika	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kelangsungan hidup dari penjualan produk SSF melalui mekanisme online. Memahami hambatan untuk implementasi kebijakan dan menyesuaikan kebijakan sesuai dengan kebutuhan konteks khusus diakui sebagai langkah yang diperlukan untuk mendukung transisi dalam SSF di seluruh Afrika dan Asia.
11.	Madeleine Gustavsson, Katia Frangoudes, et al.	Gender and Blue Justice in Small-scale Fisheries Governance	Qualitative and Systematic Literature Review (SLR)	Zanzibar (Tanzania), Chile, France and the United Kingdom (UK)	<ul style="list-style-type: none"> Menggunakan konsep 'Blue Justice' dengan pendekatan pada keadilan prosedural (proses pengambilan keputusan yang inklusif dan partisipatif) dan keadilan distributif (pembagian manfaat yang adil dari sumber daya laut). Meningkatkan keadilan prosedural dengan meningkatkan partisipasi perempuan dan merombak cara hubungan kekuasaan gender termanifestasi dalam tata kelola perikanan. Mereformasi institusi perikanan yang ada atau pembentukan organisasi baru yang secara eksplisit memperhitungkan posisi dan isu-isu perempuan sejak awal. Mengadakan program pendidikan dan pelatihan yang fokus pada gender, serta melalui kampanye kesadaran publik yang menyoroti kontribusi penting perempuan dalam perikanan.
12.	P.S. Swathi Lekshmi, Kalidoss Radhakrishnan, et al.	Gender and Small-scale Fisheries: Contribution to Livelihood and Local Economies	Qualitative Research	India	<ul style="list-style-type: none"> Mereformasi kebijakan dalam kebutuhan akan struktur upah yang egaliter bagi laki-laki dan perempuan untuk jam kerja yang sama. Melakukan pemberdayaan melalui mata pencaharian alternatif.
13.	Mariana de Oliveira Estevo, Priscila F.M. Lopes, et al.	Immediate Social and Economic Impacts of a Major Oil Spill on Brazilian Coastal Fishing communities	Qualitative Research	Brazil	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pendekatan partisipatif dengan melakukan pertemuan terfokus dan wawancara semi-terstruktur untuk terlibat langsung dengan komunitas nelayan, termasuk perempuan. Melakukan penelitian ekologi jangka panjang, seperti PELD-CCAL, yang dapat menyediakan data penting untuk memahami dinamika sistem sosial-ekologis dan menanggapi bencana lingkungan.



No	Author	Title	Type of Literature	Country	Strategy Arise
14.	Dilanthi Koralagam, Joyeeta Gupta, et al.	Inclusive Development from a Gender Perspective in Small Scale Fisheries	Qualitative Research	Global (tidak spesifik pada satu negara)	<ul style="list-style-type: none"> Melibatkan perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan untuk meningkatkan status dan partisipasi mereka. Mengadvokasi pemberdayaan perempuan melalui pendidikan, pelatihan, dan akses terhadap sumber daya. Mempromosikan kesetaraan gender dalam sistem tata kelola untuk memastikan akses yang adil terhadap sumber daya dan kekuatan pengambilan keputusan. Mengadvokasi kebijakan dan legislasi yang peka gender untuk meningkatkan status perempuan dalam proses pembangunan.
15.	Evanthie Michalena, Tiffany R.A. Straza, et al.	Promoting Sustainable and Inclusive Oceans Management in Pacific Islands Through Women and Science	Situational Analysis	Fiji	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan Promosi Metrik Gender dengan pelacakan waktu dalam peran staf dan kemajuan dalam jabatan pekerjaan. Penggunaan disagregasi data berbasis gender untuk mengukur kontribusi ekonomi dan sosial dari kegiatan kelautan. Memfasilitasi pengumpulan dan penggunaan data yang dipisahkan berdasarkan gender
16.	Catherine A. Courtney, Robert Pomeroy, et al.	Taking Stock of the Status of Implementation of the Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-scale Fisheries: A Country-level Assessment Framework	Systematic Literature Review (SLR)	Filipina dan Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-scale Fisheries (SSF Guidelines) di tingkat negara. Mengembangkan strategi investasi multisektoral guna mengurangi kemiskinan ekstrem di masyarakat nelayan dengan memfasilitasi diskusi tentang kerangka kerja hukum dan kebijakan, mengidentifikasi kesenjangan dan peluang untuk perbaikan, dan menyoroti perlunya kolaborasi lintas sektoral.
17.	Murunga, Michael.	Towards a Better Understanding of Gendered Power in Small Scale Fisheries of the Western Indian Ocean	Systematic Literature Review (SLR)	India	<ul style="list-style-type: none"> Mengubah kebijakan perikanan yang ada agar peka terhadap hubungan kekuasaan gender dan lembaga sosial budaya. Membangun kapasitas perempuan melalui pelatihan dan pendidikan diidentifikasi sebagai strategi utama. Memastikan akses yang setara terhadap sumber daya seperti pendanaan awal, fasilitas kredit, dan pasar. Menangani dan menantang norma sosial budaya yang mengakar yang melanggengkan ketidaksetaraan gender merupakan strategi yang signifikan. Merevisi undang-undang dan kebijakan yang ada untuk mencerminkan realitas dan kebutuhan baik laki-laki maupun perempuan yang terlibat dalam perikanan skala kecil. Mendorong dialog refleksif di antara para pemangku kepentingan tentang kontribusi dan peran mereka dalam perikanan dapat membantu dalam menangani dinamika kekuasaan gender.
18.	Mark Axelrod, Meghan Vona, et al.	Understanding Gender Intersectionality for More Robust Ocean Science	Literature Review	India dan Tanzania	<ul style="list-style-type: none"> Menerapkan program kesejahteraan sosial interseksional untuk mengurangi dampak kemiskinan pada perempuan di sektor perikanan skala kecil. Mengembangkan kebijakan ketenagakerjaan inklusif yang mencegah perempuan dan ibu yang sudah menikah dilarang melakukan jenis pekerjaan tertentu dan mempromosikan perempuan ke posisi yang lebih tinggi di pasar. Menangani faktor lokal yang meningkatkan kerentanan, seperti ketergantungan pekerjaan dan risiko kekerasan. Mengenali dan memperkuat jaringan sosial yang dapat memberikan dukungan dan pilihan mata pencaharian alternatif bagi perempuan. Melibatkan masyarakat lokal, khususnya perempuan, dalam proses pengambilan keputusan. Menerapkan strategi manajemen adaptif yang mempertimbangkan sifat dinamis sistem sosial dan ekologi.



No	Author	Title	Type of Literature	Country	Strategy Arise
19.	Julia Nakamura a, Ratana Chuenpagdee, et al.	Unpacking Legal and Policy Frameworks: A Step Ahead for Implementing the Small-Scale Fisheries Guidelines	Qualitative and Quantitative Research	Global (tidak spesifik pada satu negara)	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan kolaborasi lintas berbagai disiplin ilmu, termasuk keahlian hukum, kebijakan, penelitian, dan perikanan. • Melakukan identifikasi delapan isu hukum utama yang relevan dengan perikanan tangkap skala kecil, seperti definisi hukum, hak kepemilikan dan hak buruh, serta partisipasi dalam pengelolaan perikanan. • Melakukan perbandingan kerangka hukum dan kebijakan lintas negara. • Pemanfaatan instrumen hukum dan kebijakan yang ada untuk memperbaiki situasi perikanan tangkap skala kecil.
20.	Steven W. Purcell, Alejandro Tagliafico, et al.	Wicked Problem of Improving Fishery Livelihoods through Capacity Building	Meta Analysis	Fiji	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan lokakarya pelatihan praktis di desa-desa untuk mendemonstrasikan metode pemrosesan dan praktik pemanenan yang bertanggung jawab. • Melatih nelayan tentang cara menegosiasikan harga yang lebih baik dengan pedagang untuk memastikan mereka menerima kompensasi yang adil untuk produk mereka. • Mengadvokasi manajemen dan tata kelola perikanan yang lebih kuat untuk mempertahankan stok ikan liar dan memastikan kelangsungan perikanan dalam jangka panjang.

